

**ANALISIS TRANSAKSI GADAI BARANG ELEKTRONIK DALAM  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Counter RDS Cell Kota Makassar)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Islam  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**TRIS WULANDARI  
NIM. 90100115104**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MKASSAR**

**2020**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tris Wulandari  
NIM : 90100115104  
Tempat/Tgl Lahir : Soro, 06 Juli 1997  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : "Analisis Transaksi Gadai Barang Elektronik dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Counter RDS Cell Kota Makassar"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri


Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Samata Gowa , Oktober 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALA UDDIN**  
M A K A S S A R

Penulis

  
Tris Wulandari  
NIM: 90100115104



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa - GowaTlp. 841879 Fax 8221400

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Analisis Transaksi Gadai Barang Elektronik dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Counter RDS Cell Kota Makassar)" yang disusun oleh Tris Wulandari, NIM: 90100115104, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Maret 2020, bertepatan dengan 29 Dzulqa'idah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Makassar, 30 September 2020

**DEWAN PENGUJI :**

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.

Munaqisy I : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.

Munaqisy II : Dr. Amiruddin K, M.El.

Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Nurfiah Anwar, S.Hi., M. El.

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Transaksi Gadai Barang Elektronik Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Pada Counter RDS Cell Kota Makassar”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. keluarga dan sahabatnya.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Olehnya itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda **A. Latif** dan Ibunda **Khadijah** dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta do'a yang tak henti-hentinya kepada anak tercintanya.
2. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph. D.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak **Ahmad Effendi, SE, M.M.**, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak **Akramunnas, SE., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu **Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Nurfiah Anwar, S.HI., M. EI.**, selaku Pembimbing II yang selama ini penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2015, terkhusus Ekonomi Islam B dan C, telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
9. Teman-teman sejurusan Ekonomi Islam serta HMJ Ekonomi Islam yang selama ini mewarnai hidup saya.
10. Sahabat dan Teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas lain yang ada di UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas doa dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upayatelah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalam'alaikum Wr. Wb.*

Samata-Gowa, 2020

Penulis,

**TRIS WULANDARI**

**NIM: 90100115104**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN TEOROTIS.....	12-35
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	12
1. Pengertian Gadai .....	12
2. Dasar Hukum Gadai.....	15
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	21
4. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai .....	23
5. Akad-akad dalam Gadai.....	24
6. Mekanisme Pelaksanaan Gadai.....	25
7. Berakhirnya Akad Gadai.....	30
B. Tinjauan Umum Ekonomi Islam.....	31
C. Kerangka Konseptual .....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data.....	37

D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	44-61
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	44
B. Proses Transaksi Gadai Barang Elektronik pada Counter RDS Cell Kota Makassar.....	44
C. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat dalam Melakukan Transaksi Gadai Barang Elektronik pada Counter RDS Cell Kota Makassar .....	55
D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Jaminan Gadai pada Counter RDS Cell Kota Makassar .....	58
BAB V PENUTUP.....	62-64
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	68



## ABSTRAK

**NAMA : TRIS WULANDARI**  
**NIM : 90100115104**  
**JURUSAN : EKONOMI ISLAM**  
**JUDUL : Analisis Transaksi Gadai Barang Elektronik dalam Tinjauan  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Counter RDS Cell Kota Makassar).**

---

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana proses transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar, (2) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar, (3) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, sosial dan normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah pemilik counter (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Adapun cara pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara triangulasi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota dalam pelaksanaannya sudah sesuai prinsip gadai (*rahn*)

ada *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan *shigat akad*. Penggadai mendatangi counter untuk menggadaikan barang elektronik untuk mendapatkan pinjaman dan bersedia membayar biaya jasa gadai (biaya pemeliharaan dan pemeliharaan) barang jaminan gadai dan biaya administrasi pada waktu yang sudah ditentukan oleh pemilik counter sesuai yang tertera dalam nota gadai barang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan gadai barang elektronik disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: pemenuhan kebutuhan pokok, membayar uang SPP, membayar uang kos. Dalam hal penentuan biaya jasa gadai belum sesuai fatwa DSN-MUI, mengenai penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan gadai dan biaya administrasi yang masih didasarkan pada golongan pinjaman.

***Key Words:*** *Tinjauan Ekonomi Islam, Gadai Barang Elektronik.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, terkadang ia akan memerlukan sesuatu yang tidak dimiliki sendiri, atau bisa jadi suatu kali dia membutuhkan uang namun tidak ada pada dirinya, maka sebagai salah satu alternatif solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain. Sering kali tidak selamanya orang lain meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Atau mungkin seseorang merasa segan untuk meminjamkan uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut.<sup>1</sup>

Dalam bentuk pinjam-meminjam hukum Islam menganjurkan kedua belah pihak tidak dirugikan. Kreditur dibolehkan menahan barang milik debitur yang mempunyai nilai dan ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang diterimanya. Hal ini dikenal dengan istilah gadai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam*. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol 1, no. 01, (2017), h. 25.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Wacana Ulama Dan Cendekiawan"* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 213.

Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ دِيًّا إِلَى أَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Terjemahnya:

*“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan (menggadaikan) kepadanya baju besi.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai).<sup>3</sup>*

Pada hakekatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis muamalah yang pernah di praktekkan oleh Rasulullah Saw. beliau melakukan transaksi gadai pada saat di Madinah dan tidak mempunyai uang untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukan adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.<sup>4</sup>

Gadai merupakan kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi sosial. Namun, hal ini hanya berlaku pada masa Rasulullah Saw. Kini, kenyataannya banyak dari pegadaian sudah bersifat komersial. Artinya, pegadaian harus memperoleh pendapatan guna menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pegadaian mewajibkan menambah sejumlah uang tertentu kepada penggadai sebagai imbalan jasa.

<sup>3</sup>Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 01, (2017), h. 28.

<sup>4</sup>Muhammad Turmudi, Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adi*, vol. 9 no. 1, (Januari 2016), h. 163.

Usaha counter RDS Cell adalah usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang foto KTM Unismuh, Foto Copy, Service HP/Computer, Jual Beli Laptop, Foto & Cetak Foto, Fax & E-mail, dll. Disamping usaha tersebut RDS Cell juga melayani jasa gadai HP dan Laptop bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana/uang.

Tabel 1.1

Jenis barang elektronik jaminan gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar

No	Barang Elektronik	Spesifikasi		Harga
		Tipe	RAM	
1	Samsung Galaxy	J2 Pro	1.5 GB	Rp.1.200.000
2	Samsung Galaxy	J2 Prime	1.5 GB	Rp.870.000
3	Samsung Galaxy	J4	2 GB	Rp.1.300.000
4	Samsung Galaxy	A8	2 GB	Rp.1.600.000
5	Samsung Galaxy	J4	2 GB	Rp.1.300.000
6	Samsung Galaxy	J6	3 GB	Rp.1.400.000
7	Xioami	Redmi 4a	2 GB	Rp.700.000
8	Xioami	Note 6 Pro	3 GB	Rp.1.600.000
9	Vivo	Y91	2 GB	Rp.1.300.000
10	Vivo	V9	4 GB	Rp.1.900.000
11	Vivo	Y71	2 GB	Rp.1.500.000
12	Vivo	Y83	4 GB	Rp.1.700.000

13	Oppo	A35	2 GB	Rp.1.380.000
14	Oppo	A83	2 GB	Rp.1.100.000
15	Oppo	A71	3 GB	Rp.1.250.000
16	Oppo	F7	4 GB	Rp.1.800.000
17	Acer	Aspire V5	8 GB	Rp.4.950.000
18	NB Asus	X555 BP	4 GB	Rp.4.400.000

*Sumber: Counter RDS Cell, 2019.*

Tabel di atas merupakan jenis barang elektronik yang dijadikan sebagai barang jaminan pada saat transaksi gadai di counter RDS Cell. Pihak counter memberikan sejumlah pinjaman diukur dengan taksiran harga barang yang dijadikan jaminan. Apabila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak counter memberikan jangka waktu pengembalian dana paling lambat dua bulan satu minggu sesuai yang ada dalam nota gadai barang. Dengan biaya jasa gadai 10% per bulan dan untuk jangka waktu pengembalian tiga hari dikenakan biaya jasa gadai 5% sebagai biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan gadai. Misalnya si peggadai menggadaikan barangnya senilai Rp.500.000, apabila si penggadai melunasinya dalam jangka tiga hari maka biaya jasa gadai yang diberikan oleh counter sebesar 5% = Rp.25.000 dan apabila si penggadai melunasi dalam jangka satu bulan maka dikenakan biaya jasa gadai 10% = Rp.50.000. Saat pegadaian berlangsung si penggadai akan menerima struk atau nota gadai barang. Dan membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000. Apabila pihak penggadai tidak membayar sesuai

waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan gadai akan dijual dan kemudian menjadi milik pihak counter.

Dengan melihat latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transaksi Gadai Barang Elektronik Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Counter RDS Cell Kota Makassar).”**

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini bertujuan agar ruang lingkup pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan tetap fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana penulis menfokuskan penelitian ini hanya pada transaksi gadai barang elektronik dalam tinjauan ekonomi Islam.

### **2. Deskripsi Fokus**

Transaksi gadai adalah menyimpan sementara harta milik peminjam atau pengutang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh piutang, dan barang tersebut bisa diambil dalam waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini penggadai atau pengutang memberikan barangnya (barang elektronik) kepada pihak counter sebagai jaminan atas pinjamannya.

Barang Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Barang elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hp, dan Laptop.

Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat komersial

maupun non-komersial dan memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi non-Islam.<sup>5</sup>

Jadi yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah mengenai transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar. Kemudian penulis menganalisa praktek gadai tersebut dalam tinjauan ekonomi Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosetransaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penentuan biaya jasa gadai gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar?

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu yang menyangkut pandangan hukum Islam terhadap gadai barang elektronik yaitu:

1. Penelitian Susanti (2016) pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”. Dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan konsep

---

<sup>5</sup>Ridwansyah, *Mengenal Istila-istilah dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Aura Anugerah Utama Raharja, 2012), h. 38.



harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi apabila pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya supaya tidak merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.<sup>6</sup>

2. Penelitian Surepno (2018) pada jurnalnya yang berjudul “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Dalam hasil penelitiannya bahwa Akad rahn tidak hanya digunakan dalam perusahaan umum pegadaian saja, namun juga praktek rahn ini telah diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syari’ah, tetapi bukan menjadi produk utama melainkan sebagai pelengkap. Salah satu manfaat yang diambil pihak bank dari praktik rahn ini adalah memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) jaminan yang dipegang oleh bank.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Susanti, Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Intelektualita*, vol 5, no. 1, (Juni 2016), h. 53-60.

<sup>7</sup>Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2 (September 2018), h. 180.

3. Penelitian Imam Sofi'i (2016) pada jurnalnya yang berjudul "Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Palembang Banten)". Dalam hasil penelitiannya bahwa prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin Pondok Cabe digunakan sebagai pengikat jaminan yang diberikan BMT kepada nasabah. Produk rahn pada produk gadai emas syariah BMT Al Muqrin digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.<sup>8</sup>
4. Penelitian Andi Irfan (2012) pada jurnalnya yang berjudul "Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian) Mengatasi Masalah Dengan Masalah". Dengan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan, mereka menginterpretasikan bahwa gadai yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang biasa dan mereka merasa bahwa praktik ini tidak terlalu penting sesuai dengan Islam. Dan disini terlibat bahwa masyarakat sudah tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan praktik yang sesuai syariah. Dari beberapa temuan terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Pertama, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, tetapi kenyataannya bertentangan dengan syariah yaitu *murtahin* memanfaatkan *marhun* dan tidak melakukan pemeliharaan terhadap *marhun* padahal *marhun* merupakan amanah dan masih hak *rahin* terhadap

---

<sup>8</sup>Imam Sofi'i, Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Palembang Banten). vol. 1, no 2, (2016), h. 110.

*marhun* tersebut. Kedua, apabila *marhun* digunakan untuk melunasi hutang kepada *murtahin* maka hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Tetapi kenyataannya dilapangan bertentangan dengan syariah yaitu *marhun* akan menjadi milik *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar artinya tidak ada proses lelang yang sesuai syariah terhadap *marhun* tersebut.<sup>9</sup>

5. Penelitian Rachmad Saleh Nasution (2016) pada jurnalnya yang berjudul “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”. Dalam hasil penelitiannya bahwa Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan sistem operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan analisa terhadap produk-produk yang ditawarkan, serta transaksi dan akad-akad yang digunakan dimana sudah sesuai dengan praktek gadai dalam fiqh mu’amalah. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan juga telah merujuk kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam mengeluarkan produk-produknya. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan memperoleh pendapatan dari biaya *ijarah* dan margin yang ditetapkan. Dari berbagai produk yang ditawarkan, produk gadai (*rahn*) memberi

---

<sup>9</sup>Andi Irfan, Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Pegadaian) Menagatsi Masalah Dengan Masalah. vol. 10, no. 2, (2012), h. 62.

kontribusi yang terbesar dimana mempersentasikansekitar 80% dari total pendapatan pegadaian.<sup>10</sup>

Berdasarkan kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum ada yang membahasnya secara khusus, yaitu dengan topik *Analisis Terhadap Transaksi Gadai Barang Elektronik dalam Tinjauan Ekonomi Islam(Studi KasusPada Counter RDS Cell Kota Makassar)*. Dalam pembahasan penulis yaitu mengenai proses transaksi gadai barang elektronik, faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai, serta biaya jasa gadai dalam tinjauan ekonomi Islam.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar.

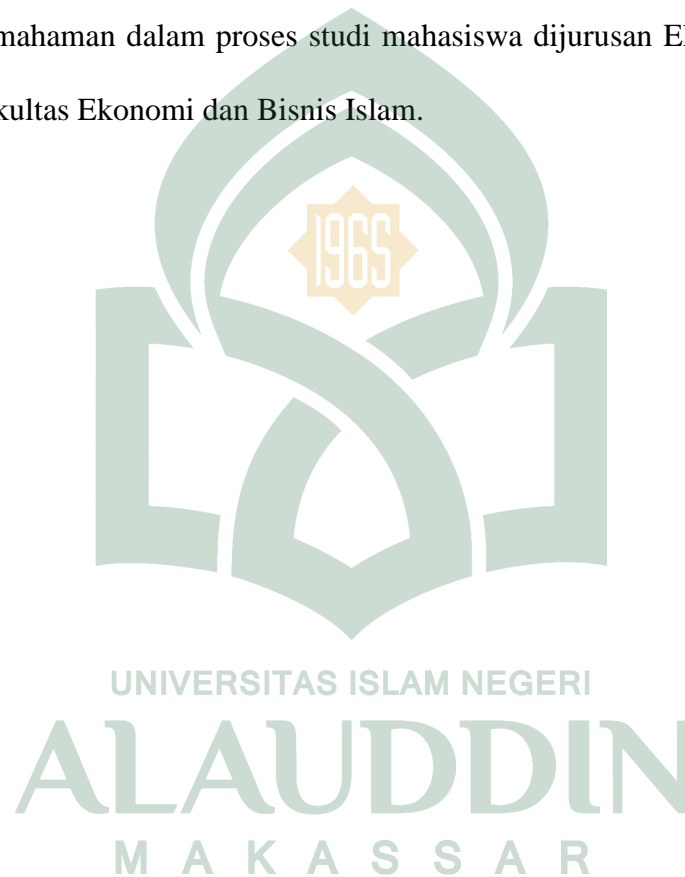
---

<sup>10</sup>Rachmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. vol. 2, no. 2, (2016), h. 115.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan pemahaman dalam proses studi mahasiswa di jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## BAB II

### TINJUAN TEORETIS

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Gadai*

##### 1. Pengertian Gadai

Gadai secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>11</sup>

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 387.

- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
- d. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya”.<sup>12</sup>

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai “diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak penggadai”.<sup>13</sup>

Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah “sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain”, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut: penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanya untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.

---

<sup>12</sup>Purwahid Parik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003), h. 3.

<sup>13</sup>Elise T Sulisteni dan Rudi T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), h. 159.

Pada umumnya masyarakat memahami gadai sebagai barang jaminan atas utang. Dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.<sup>14</sup>

Menurut bahasa Arab gadai adalah *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, yang artinya penahanan. Begitu pun juga dikatakan “*ni'matun rohinah*” yang berarti karunia yang tetap lestari.<sup>15</sup> *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubat* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta lain dalam pandangan syara' untuk kepercayaan sesuatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>16</sup> Sayyid sabbiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan uang, hingga orang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>17</sup>

*Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

<sup>14</sup>H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 310.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Terj.H. Kamaruddin A. Marzuki) (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), h. 139.

<sup>16</sup>Muhammad Turnudi, Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Adl*, vol. 9, no. 1, (Januari 2016), h. 164.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Terj.H. Kamaruddin A. Marzuki), h. 139.



ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>18</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>19</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba*, *gharar*, dan *maisir*.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan gadai (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw., Ijma' Ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUH Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian syariah*, Cet.I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 57.

<sup>19</sup>Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159-160.

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

### a. Al-Qur'an

QS Al Baqarah/2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَّتِهِ اللَّهُ رَبُّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨٣}

Terjemahnya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Al-Baqarah 283).*

QS. Al-Baqarah 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.<sup>21</sup>

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang *rahn*.

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 51.

### b. Al-Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah katanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Terjemahnya:

*"Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan (menggadaikan) kepadanya baju besi". HR. Bukhari Muslim.*

Anas Bin Malik juga pernah mengatakan:

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لَهُ

Terjemahnya:

*"Rasulullah saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang sari (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau". HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah.*

Dari kedua hadis di atas menjadi dalil bahwa gadai (*rahn*) itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadis tersebut menjadi diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Dari hadis ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mula gadai adalah berkenaan dengan muamalah dengan orang-orang kafir, hal ini tentu membawa

hikmah agar *murtahin* merasa tentram dengan harta benda yang dihutangkan kepada *rahin* karena adanya jaminan (gadai) tersebut maka jika seaktu-waktu dia tidak dapat melunasi hutangnya.<sup>22</sup>

### c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu para fuqaha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan "hasil ijtihad

---

<sup>22</sup>Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. vol 1, no. 01, (2017), h. 27-28.

para fuqaha', antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)".<sup>23</sup>

#### **d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Adapun ketentuan *rahn* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar penggantian biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

---

<sup>23</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Maghiram Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fy, *shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, h. 116.

## 5. Penjualan *marhun*

- a) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak mau melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.<sup>24</sup>

### e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 1. Pasal 1150, yang berisi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang didahulukan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2015), h. 365-366.

<sup>25</sup>Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 307.

2. Pasal 1151, yang berisi:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk memberikan perjanjian pokoknya”.

3. Pasal 1152, yang berisi:

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun, bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaanya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurangan barang itu untuk menuntutnya kembali.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari’at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, h.308.

## 1. Rukun Gadai

Yang termasuk rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. Ar-Rahin yaitu orang yang menggadaikan.

Ar-Rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

- b. Al-Murtahin yaitu yang menerima gadai.

Al-Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Tentang *rahin* dan *murtahin* disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang berakal dan baligh.

- c. Al-Marhun yaitu barang yang digadaikan.

Marhun merupakan barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

- 1) Dapat diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki rahin.



d. Al-Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk *marhun bih*, yaitu:

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatannya.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

e. Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

## 2. Syarat Gadai

Diantara syarat sahnya aqad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan ada pada saat terjadinya akad)
- d. Jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.<sup>27</sup>

## 4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*) antara lain:

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai

---

<sup>27</sup>Muhammad Turnudi, Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Adl*, vol.9, no. 1, (Januari 2016), h. 165

(*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) antara lain:

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila menerima gadai menyalahgunakan harta benda gadaianya.

## 5. Akad-akad dalam Gadai

Menurut Nurul Huda ada dua akad dalam transaksi gadai syariah antara lain:

- a. Akad *Rahn*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh utang atau sebagian piutangnya.

Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad *Ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>28</sup>

## 6. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

### 1. Sigat Akad

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertamamengenai isi perkatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya."<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Cet ke-3 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), h. 279.

<sup>29</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy: Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.”<sup>30</sup>

Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>31</sup>

a. Sigat secara lisan

Sigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak

---

<sup>30</sup>Hasbi ash- Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Mua'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), h.21-22

<sup>31</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

b. Sigat akad dengan tulisan

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

2. *Aqid* (subyek gadai)

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baligh, berakal dan tidak *majhur 'alaih* (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil.

Imam asy-Syafi'i melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta *majhur'alaih* dengan digadaikan karena dua hal yaitu:

- a. Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain menggadaikan harta *mahjur 'alaih*.
- b. Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi *mahjur 'alaih*.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi aqid baligh. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

### 3. *Marhun* (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan:

- a. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya: tanah, rumah dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Sebagaimana jual beli syarat *marhun* harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah di masak, juga menggadaikan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi'i mengatakan sebagai berikut: Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang

---

<sup>32</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 53.

boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.

- c. *Marhun* berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah di jelaskan diatas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. *Marhun* adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.<sup>33</sup>

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan terimakan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan terimakan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan. Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaanya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek gadai.

Gadai merupakan bagian dari Mua'malah, oleh karena itu gadai juga mengutip prinsi-prinsip muamalah antar lain:

- a. Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindar dari unsur-unsur penganiayaan.
- b. Dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>34</sup>

#### 4. *Marhun bih* (hutang)

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai.

Adapaun syarat-syaratnya antara lain:

- a. Penyebab penggadaian adalah hutang

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang*, h. 53-54.

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

- b. Hutang sudah tetap
- c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada *la-ja'lu* (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

## 7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain *rahn* akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.
2. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini diperbolehkan.
3. Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw: "*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya.*"



4. penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo maka *murtahin* bisa menjual *marhun*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya maka hakim yang menjualnya untuk melunas utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasnya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikonomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>36</sup>

Menurut An-Nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang mampu ikut terbit dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang

<sup>35</sup>Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Cet.I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 72-73.

<sup>36</sup>Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. I (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

mereka peroleh. Populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah-kerumah, menjadi kelompok (*community*) yang diperintah oleh negara.<sup>37</sup>

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut: Pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.<sup>38</sup>

Dari pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi berdasarkan kepada hukum pelaksanaan. Menerangkan bahwa, semua sarana yang digunakan tidak lepas dari syariat Allah swt. Kemudian pengertian ekonomi Islam berdasarkan pada sistem pelaksanaan atau proses dari ekonomi Islam itu sendiri dikemukakan oleh Monzer Kahf yaitu: Ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.<sup>39</sup>

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaran dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di

---

<sup>37</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah, Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.47.

<sup>38</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zaenal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

<sup>39</sup>Eka Sriwayuni, Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *AL-INTAJ*, vol. 3, no. 1, (Maret 2017), h. 172.

akhirat. Seorang fuqaha asal mesir bernama prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umatnya yaitu:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima dasar yaitu:
  - a. Keselamatan keyakinan agama (*al-din*)
  - b. Keselamatan jiwa (*al-nafs*)
  - c. Keselamatan akal (*al-aql*)
  - d. Keselematan keluarga dan keturunan (*al-nasl*)
  - e. Keselamatan harta benda (*al-mal*)

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak ekonommi Islam adalah kerja sama.

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamain kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt. Dan hari penentuan akhir nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.<sup>40</sup>

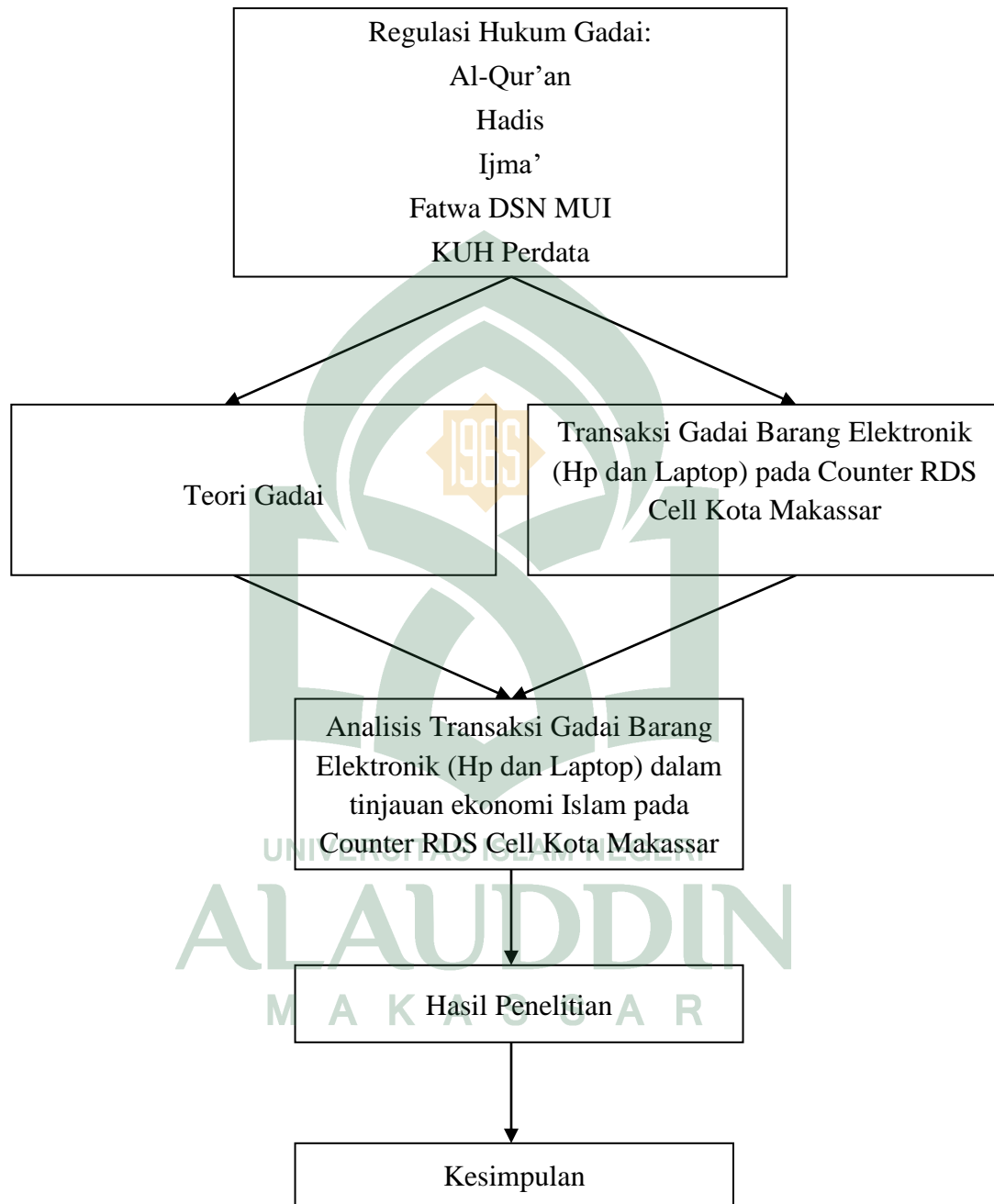
### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual transaksi gadai barang elektronik di counter RDS CELL Kota Makassar dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual sebagaimana gambar berikut:



---

<sup>40</sup>Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. I (Malang: Kurnia Advertissing, 2012), h. 125.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.<sup>41</sup>

###### **2. Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian pada counter RDS Cell Kota Makassar yang ada di Jl. Talasalapang Kec. Rappocini Kota Makassar.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###### **1. Pendekatan Fenomenologis**

Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang muncul disekitar lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi yang terjadi pada masyarakat yang melakukan transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), h. 6.

dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang dengan maksud menemukan fakta.

## 2. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang mengacu pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial didalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan sosial karena penelitian yang akan dilakukan peneliti berhubungan dengan masyarakat sosial.

## 3. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an (QS. Al-Baqarah 283), Hadis (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah), Ijma', (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002), dan KUH Perdata.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yakni mendiskripsikan atau penggambaran sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian. Sumber data yang peneliti kumpulkan adalah data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan dan penjelasan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Adapun jenis sumber data yang digunakan peneliti antara lain:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.<sup>42</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik transaksi gadai barang elektronik pada counter RDS Cell Kota Makassar.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan:

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>43</sup> Sebagai sarana untuk memperkuat data atau informasi untuk menjawab masalah yang akan diteliti pada counter RDS Cell Kota Makassar.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Ed. 3 (Jakarta: Erlangga), h. 148.

<sup>43</sup>Suharsini Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 21-22.



### 1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.<sup>44</sup> Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian.

Dalam melakukan wawancara maka peneliti harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik counter (penerima gadai) dan masyarakat (penggadai).

### 3. Dokumentasi

Dokumenatsi adalah mencarai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan smartphone untuk melakukan dokumantasi.

---

<sup>44</sup>Muhammad Idrus, *Metode Peneltian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 55.

<sup>45</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarta, 2000), h.178.

### **E. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud penulis yaitu buku tulis, pulpen dan handphone untuk merekam atau menfoto pada saat melakukan penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup> Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Langkah awal adalah menganalisis hasil penelitian ini adalah laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokoknya, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

---

<sup>46</sup>Sugiyono. *Mahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>47</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Berdasarkan kutipan tersebut, penelitian kualitatif lebih bersifat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dengan menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan.<sup>48</sup>

## 3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemuykan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan kualitatif mungkindapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

---

<sup>47</sup>Masnur Muslich. *Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Itu Mudah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 337.

<sup>48</sup>Masnur Muslich. *Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Itu Mudah*, h. 341.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>49</sup> Menurut Patton ada empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi data

Triangulasi data ialah peneliti yang mengumpulkan data, haruslah menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai satu objek atau lebih yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori ialah sebagai bahan untuk menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang sudah dikumpulkan sudah bersyarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dipaparkan pada tinjauan teoritis untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.330.

### 3. Triangulasi Pengamat

Triangulasi pengamat ialah adanya pengamat yang selain peneliti turut memeriksa hasil pengumpulan data.

### 4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dan observasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>50</sup>

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi teori. Pada triangulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara, yakni dengan berbagai informan seperti pemilik counter dan masyarakat (penggada). Sedangkan pada triangulasi teori, peneliti akan menguraikan tentang transaksi gadai barang elektronik dalam tinjauan ekonomi Islam sesuai dengan yang diuraikan pada tinjauan teoritis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.29.

## **BAB VI**

### **ANALISIS TRANSAKSI GADAI BARANG ELEKTRONIK DALAM TINJUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Counter RDS Cell Kota Makassar)**

#### ***A. Gambaran Lokasi Penelitian***

Counter RDS Cell berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh bapak H. Muh. Radhi Rasdha, SE dan ibu Khaeriah Kasim yang beralamat di Jl. Talasalapang No. 1, Sari, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Counter RDS Cell adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang Foto KTM Unismuh, Foto Copy, Service HP/Computer, Jual Beli Laptop, Foto & Cetak Foto, Fax & E-mail, dll. Selain bergerak pada bidang-bidang tersebut, counter RDS Cell juga melayani jasa titip gadai barang elektronik (Hp dan Laptop) bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Counter RDS Cell mulai beroperasi dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 Wita. Pada hari jum'at tutup pukul 12.00 – 15.00 Wita. Hari libur tetap buka kecuali hari minggu tutup.<sup>51</sup>

#### ***B. Proses Transaksi Gadai Barang Elektronik pada Counter RDS Cell Kota Makassar***

Praktek gadai yang dilakukan pada counter RDS Cell Kota Makassar merupakan praktek gadai barang elektronik (hp dan laptop). Praktek gadai ini

---

<sup>51</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (7 November 2019).

dilakukan karena masyarakat membutuhkan pinjaman dana untuk berbagai keperluan dan kebutuhan, sehingga yang dijadikan jaminan dalam gadai ini adalah barang elektronik (hp dan laptop).

#### **a. Syarat Pengajuan Gadai Barang Elektronik**

Pernyataan Ibu Khaeriah selaku pemilik counter RDS Cell beliau menyatakan bahwa syarat pengajuan gadai adalah barang elektronik (hp dan laptop) beserta kelengkapannya dan foto copy KTP. Berikut pernyataan beliau:

Syaratnya ya barang elektronik (hp dan laptop) disertai kelengkapannya seperti cas, dos, baterai, H. Free, tas, memori, soft case, hard case, mouse, sim card, dan modem. Sama kartu identitas KTP yang sudah di foto copy.<sup>52</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh para penggadai salah satunya penggadai saudara Ulil Sahrir. Berikut hasil wawancara dengan Ulil Sahrir:

Syaratnya saya membawa barang yang akan saya gadai yaitu hp dan kelengkapannya seperti cas dan dos dengan foto copy KTP.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggadai maupun pemilik counter bahwa syarat pengajuan gadai pada counter RDS Cell yaitu barang elektronik yang disertai dengan kelengkapannya dan identitas berupa KTP yang sudah di foto copy.

Dalam teori, syarat dalam pengajuan gadai merupakan barang yang bisa dijaminkan, dalam hal ini adalah barang elektronik. Syarat barang jaminan harus bisa diperjualbelikan, merupakan harta yang bernilai, harus dapat dimanfaatkan, harus diketahuisecara fisiknya, dan harus milik *rahin* (penggadai) atau harus seizin pemilik barang tersebut.

---

<sup>52</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (7 November 2019).

<sup>53</sup>Ulil Sahrir (Penggadai), Wawancara, (22 November 2019).

Pada dasarnya barang jaminan tersebut adalah sebagai kepercayaan dalam sebuah hutang piutang, akan tetapi untuk melindungi kepentingan *murtahin* (counter RDS Cell) yaitu apabila penggadai mengingkari janji hutangnya maka barang tersebut akan dijual oleh pihak counter.

#### **b. Pelaksanaan gadai Barang Elektronik**

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai tersebut antara lain: shigat akad, *murtahin*, *rahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. Shigat akad yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad dinyatakan. Akad merupakan perjanjian yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya. Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau keridhoan dari pihak yang mengadakan transaksi gadai.

Pernyataan Ibu Khaeriah selaku pemilik counter mengenai pelaksanaan gadai barang elektronik sebagai berikut:

Penggadai datang kemudian mengantri. Setelah itu menyerahkan barang jaminan (barang elektronik) beserta kelengkapannya, kemudian KTP yang sudah di foto copy sekaligus mengajukan jumlah pinjaman. Kemudian saya akan menaksir barang elektronik itu untuk mengetahui apakah pinjaman yang diajukan penggadai sesuai dengan taksiran dari barang elektronik. Kemudian saya memberitahu penggadai tentang nominal pinjaman tersebut. Jika sudah sepakat maka penggadai akan membaca isi perjanjian yang ada dalam nota



gadai barang sebagai bukti transaksi gadai dan kemudian menandatangani. Penggadaai dapat pinjamannya, barang elektronik saya tahan.<sup>54</sup>

Ibu Khaeriah mengatakan bahwa pelaksanaan gadai barang elektronik pada counter RDS Cell yaitu penggadaai datang kemudian mengantri, setelah itu menyerahkan barang elektronik beserta kelengkapannya dan KTP yang sudah di foto copy sekaligus memberitahu pihak counter jumlah pinjaman yang diajukan. Kemudian beliau menkasir barang elektronik tersebut dan memberikan pinjaman sesuai taksiran barang. Kemudian beliau memberitahu penggadaai nominal pinjaman. Apabila penggadaai sudah sepakat maka penggadaai akan menandatangani nota gadai barang sebagai bukti transaksi gadai. Selanjutnya penggadaai mendapatkan pinjaman dan barang elektronik mereka ditahan oleh counter RDS Cell.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh penggadaai mengenai pelaksanaan gadai barang elektronik pada counter RDS Cell:

Saya mendatangi counter langsung kemudian mengantri. Setelah itu saya menyerahkan barang yang akan saya gadai beserta kelengkapan barang dan foto copy KTP. Kemudian saya mengajukan jumlah pinjaman yang saya butuhkan. Kemudian pihak counter akan menkasir barang pinjaman dan memberikan pinjaman sesuai taksir harga barang yang saya gadai. Setelah itu pihak counter memberitahu nominal pinjaman. Bila saya sudah sepakat kemudian saya akan menandatangani nota gadai barang sebagai bukti transaksi gadai. Setelah itu saya mendapatkan pinjaman, dan barang saya ditahan oleh pihak counter.<sup>55</sup>

Pelaksanaan gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar pada umumnya sama dengancounter lainnya. Penggadaai mendatangi counter dengan tujuan menggadaikan barang elektronik untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan taksir

<sup>54</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (7 November 2019).

<sup>55</sup>Ulil Sahrir, (Penggadaai), Wawancara, (20 November 2019).

yang diberikan oleh pihak counter. Setelah sepakat dengan taksiran pinjaman tersebut kemudian penggadai menandatangani nota gadai barang sebagai bukti transaksi gadai.

Dari hasil wawancara, pelaksanaan gadai pada counter RDS Cell sudah memenuhi mekanisme dalam pelaksanaan gadai. Pihak counter berperan sebagai (*murtahin*), penggadai berperan sebagai (*rahin*), barang (*marhun*) yang dijadikan jaminan dalam gadai (hp dan laptop), kemudian hutang (*marhun bih*) atas pinjaman tersebut. Adapun akad yang digunakan RDS Cell dalam melaksanakan gadai adalah akad perjanjian gadai (*rahn*).

### c. Kasus Gadai Barang Elektronik

Berikut kasus gadai dan hasil wawancara dengan para penggadai counter RDS Cel:

- 1) Ulil Sahrir menggadaikan hp Xiami Redmi 4a dengan nilai taksiran barang sebesar Rp.500.000. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan Ulil Sahrir mengambil uang pinjaman berdasarkan kebutuhannya. Jadi, Ulil mengambil uang pinjaman sebesar Rp.250.000. Kemudian dikenakan biaya jasa gadai sebesar 10% perbulan, jika Ulil Sahrir menebus dalam jangka 3 hari maka biaya jasa gadai sebesar 5%. Kemudian Ulil Sahrir membayar biaya administrasi sebesar Rp.2.500. Ulil Sahrir

menebus pinjamannya dalam jangka waktu satu bulan. Jadi, total jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh saudara Ulil Sahrir adalah Rp.277.500.<sup>56</sup>

- 2) Saudara Ramlin menggadaikan hp Samsung Galaxy J2 Pro dengan nilai taksiran barang sebesar Rp.500.000. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan Ramlin mengambil uang pinjaman berdasarkan kebutuhannya. Jadi, Ramlin mengambil uang pinjaman sebesar Rp.300.000. Kemudian dikenakan biaya jasa gadai sebesar 10% perbulan, jika Ramlin menebus dalam jangka 3 hari maka biaya jasa gadai sebesar 5%. Kemudian Ramlin membayar biaya administrasi sebesar Rp.3.000. Ramlin menebus pinjamannya dalam jangka dua bulan. Jadi, total jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh saudara Ramlin adalah Rp.311.000.<sup>57</sup>
- 3) Saudari Agustina menggadaikan laptop Acer Aspire V5 dengan nilai taksiran barang sebesar Rp.2.000.000. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan Agustina mengambil uang pinjaman berdasarkan kebutuhannya. Jadi, Agustina mengambil uang pinjaman sebesar Rp.1.200.000. Kemudian dikenakan biaya jasa gadai sebesar 10% perbulan, jika Agustina menebus dalam jangka 3 hari maka biaya jasa gadai sebesar 5%. Kemudian Agustina membayar biaya administrasi sebesar Rp.12.000. Agustina

---

<sup>56</sup>Ulil Sahrir (Penggadai), Wawancara, (20 November 2019).

<sup>57</sup>Ramlin (Penggadai), Wawancara, (22 November 2019).

menebus pinjamannya dalam jangka satu bulan. Jadi, total jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh saudara Agustina adalah Rp.1.332.000.<sup>58</sup>

- 4) Saudara Dedi menggadaikan hp Vivo Y91 dengan nilai taksiran barang sebesar Rp.1.000.000. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan Dedi mengambil uang pinjaman berdasarkan kebutuhannya. Jadi, Dedi mengambil uang pinjaman sebesar Rp.500.000. Kemudian dikenakan biaya jasa gadai sebesar 10% perbulan, jika Dedi menebus dalam jangka 3 hari maka biaya jasa gadai sebesar 5%. Kemudian Dedi membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000. Dedi menebus pinjamannya dalam jangka satu bulan. Jadi, total jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh saudara Dedi adalah Rp.550.000.<sup>59</sup>

#### **d. Penentuan Biaya Jasa Gadai**

Penentuan biaya jasa gadai pada counter RDS Cell ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh penggadaikan. Besarnya jumlah pinjaman, RDS Cell memberikan pinjaman berdasarkan pada taksiran harga barang yang ingin digadaikan. Tidak boleh melewati dari harga taksiran barang. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Khaeriah selaku pemilik counter:

Mengenai besaran jumlah pinjaman, saya memberikan pinjaman berdasarkan taksiran harga barang pada saat itu. Itupun kalau barang yang digadaikan lengkap dengan dos, cas, dan sebagainya. Ya, kalau barang tidak lengkap. Saya hanya bisa memberi pinjaman dibawah dari harga taksiran barang.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Agustina (Penggadai), Wawancara, (17 November 2019).

<sup>59</sup>Dedi (Penggadai), Wawancara, (20 November 2019).

<sup>60</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (11 November 2019).

Menurut hasil wawancara tersebut ibu Khaeriah mengatakan bahwa jumlah pinjaman diberikan berdasarkan taksir harga barang dan serta kelengkapan barang yang dijadikan jaminan. Ketika barang ditaksir angka taksiran barang tidak sampai 100% dari nilai barang, misalnya turun menjadi 80%. Kemudian setelah dilihat dari nilai taksir barang pemilik counter memberikan pinjaman sesuai kelengkapan barang. Sehingga, apabila barang tersebut tidak lengkap dengan dos, cas dan sebagainya maka jumlah pinjaman yang akan diberikan akan menurun.

Menurut hasil wawancara, pihak counter memberikan pinjaman barang dan berdasarkan dari taksir harga barang dan kelengkapan barang karena harga barang elektronik (hp dan laptop) kedepan akan semakin turun harganya, bila penggadaai tidak menebus barang sampai jatuh tempo. Otomatis saat barang tersebut dijual, uang hasil penjualan barang hanya mencukupi untuk membayar uang pinjaman saja dan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya jasa gadai, biaya administrasi serta biaya penjualan barang. Belum lagi bila barang jaminan tersebut tidak lengkap dengan cas, dos dan sebagainya, maka harga barang akan turun dari harga normalnya ketika dijual.

Biaya jasa gadai merupakan biaya yang digunakan untuk (biaya pemeliharaan dan penyimpanan), dalam hal ini pegadaai menyewa tempat atau etalase untuk menyimpan barang gadainya pada counter RDS Cell. Mengenai biaya jasa gadai ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Seperti yang dikatakan oleh ibu Khaeriah bahwa:

Biaya jasa gadai di tentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diajukan oleh pegadai. Biaya jasa gadai di gunakan untuk biaya pemeliharaan serta sewa tempat penyimpanan barang gadai.<sup>61</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ibu Khaeriah bahwa biaya jasa gadai dihitung 10% per bulannya. Apabila gadai masuk pada bulan ke dua masa perpanjangan, biaya jasa gadai dihitung lagi 10% sampai masuk pada masapelelangan. Namun, untuk penebusan dalam waktu tiga hari counter RDS Cell meberikan biaya jasa gadai sebesar 5%. Apabila penggadai menebus dalam waktu empat hari, biaya jasa gadai tetap dihitung satu bulan.<sup>62</sup>

**e. Penjualan barang (*marhun*)**

Adapun mengenai dispensasi waktu gadai pada counter RDS Cell yaitu paling lambat dua bulan satu minggu. Counter RDS Cell memberikan masa gadai satu bulan, jika belum ditebus maka counter RDS Cell memberikan masa perpanjangan satu bulan, jika belum ditebus maka masuk masa pelelangan satu minggu. Namun, jika penggadai belum juga menebus maka counter RDS Cell berhak menjual barang gadai tanpa persetujuan dan tanpa menghubungi pihak penggadai berdasarkan ketentuan dalam nota gadai barang. Sepeti yang diungkapkan oleh ibu Khaeriah mengenai dispensasi waktu gadai sebagai berikut:

Saya memberikan dispensasi waktu gadai paling lambat dua bulan satu minggu. Untuk satu bulan masuk pada masa gadai, jika belum ditebus maka masuk pada masa perpanjangan satu bulan, jika belum ditebus maka masuk pada masa pelelangan satu minggu, jika belum juga ditebus maka counter

---

<sup>61</sup>Ibu Kaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (11 November 2019).

<sup>62</sup>Ibu Kaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (11 November 2019).

berhak menjual barang gadai tanpa persetujuan dan tanpa menghubungi si penggadai.<sup>63</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ibu Khaeriah selaku pemilik counter, beliau mengatakan bahwa apabila gadai melewati masa lelang maka pihak counter akan menjual barang gadai tanpa persetujuan dan tanpa menghubungi penggadai. Pihak counter tidak memperingatkan atau menghubungi penggadai agar melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa dalam penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Jadi, dalam hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut seharusnya pihak counter memperingatkan atau menghubungi penggadai untuk segera melunasi hutangnya sebelum barangnya dijual.

Pada masa pelelangan penggadai masih bisa menebus barangnya. Namun, apabila penggadai belum menebus barangnya tersebut maka pihak counter akan menjualnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Khaeriah:

Masa pelelangan barang gadai dilakukan selama satu minggu. selama satu minggu itu, penggadai masih bisa menebus barangnya. Apabila penggadai belum menebusnya maka pihak counter akan menjual barang gadai. Kemudian hasil penjualan barang gadai seluruhnya menjadi milik counter.<sup>64</sup>

Penjualan barang dilakukan setelah lewat masa lelang satu minggu. Bila penggadai tidak menebus barangnya pihak counter akan menjualnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Khaeriah bahwa hasil penjualan barang gadai seluruhnya menjadi

---

<sup>63</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (11 November 2019).

<sup>64</sup>Ibu Khaeriah (Pemilik Counter), Wawancara, (11 November 2019).

milik counter karena setelah barang gadai melewati jatuh tempo, maka penggadaai sudah tidak berhak lagi atas barang tersebut. Uang hasil penjualan barang digunakan untuk membayar uang pinjaman, biaya jasa gadai, biaya administrasi, dan biaya penjualan. Bila terdapat selisih dari hasil penjualan, maka selisih tersebut akan menjadi milik counter.

Menurut fatwa DSN MUI mengatakan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahindan* kekurangan menjadi kewajiban *rahin*. Berdasarkan fatwa tersebut seharusnya pihak counter memberikan kelebihan hasil penjualan barang gadai dalam artian selisih uang hasil penjualan, setelah membayar uang pinjaman, biaya jasa gadai, dan biaya administrasi, serta biaya penjualan adalah hak penggadaai.

Jadi, sesuai ketentuan yang sudah disepakati yang ditanda tangani saat melakukan transaksi gadai, maka penggadaai sudah tidak berhak memiliki barang gadai tersebut karena sudah melewati waktu gadai yang telah diberikan dan barang jaminan menjadi milik counter. Maka berakhirlah akad gadai barang elektronik tersebut.

Menurut teori bahwa akad gadai dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain *rahn* akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.



3. Jika *rahn* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahn* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahn* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai sabda rasulullah Saw: “*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya.*”
4. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo maka *murtahin* bisa menjual *marhun*. Apabila *rahn* tidak mau menjual hartanya maka hakim yang menjualnya untuk melunas utangnya (*rahn*). Dengan telah dilunasnya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa berakhirnya akad gadai pada counter RDS Cell, apabila barang penggadai sudah dijual karena sudah jatuh tempo dan apabila penggadai telah menebus barang gadainya.

### **C. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat dalam Melakukan Transaksi Gadai Barang Elektronik pada Counter RDS Cell Kota Makassar**

Kebutuhan dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana

---

<sup>65</sup>Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian syariah*, Cet.I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 72-73.

pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik motif *philantropis* maupun bisnis.<sup>66</sup>

Akan tetapi dalam mencari suatu pinjaman tidaklah mudah karena sekarang ini sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sehingga untuk kepercayaan untuk mendapat suatu pinjaman harus ada barang jaminan yang lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.<sup>67</sup>

Alasan terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat pada counter RDS Cell Kota Makassar adalah karena beberapa faktor antara lain:

#### 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok juga menjadi salah satu alasan dilakukannya gadai barang elektronik pada counter RDS Cell. Karena rata-rata yang melakukan gadai adalah dari kalangan mahasiswa jadi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman dan lainnya mereka menggadaikan barang elektronik miliknya. Sebagian besar mereka hanya bergantung atau menunggu uang kiriman dari orang tua dikampung bagi yang perantau. Seperti yang di alami oleh Ulil Sahrir yang telah menggadaikan handphone Xiami Redmi 4a miliknya dengan jumlah uang yang

---

<sup>66</sup>Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*. (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), h. 115

<sup>67</sup>Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

diterima sebesar Rp.250.000. yang kemudian uang tersebut di gunakan untuk membeli beras, air minum dan kebutuhan lainnya.<sup>68</sup>

Hal yang serupa dilakukan oleh saudara Ramlin, yang telah menggadaikan handphone Samsung Galaxy J2 Pro miliknya dengan jumlah uang yang diterima Rp.300.000. yang kemudian dia gunakan untuk membeli makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya seperti rokok dan uang bensin.<sup>69</sup>

## 2. Membayar Uang SPP

Salah satu alasan penggadaian menggadaikan barang elektroniknya iala karena membutuhkan uang untuk membayar SPP. Seperti yang dialami oleh Saudara Agustina, dia telah menggadaikan Laptop Acer Aspire V5 miliknya dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.200.000. Berhubung orang tua dikampung belum punya uang dan tanaman bawang jatuh pada musim panen, karena rata-rata orang orang tua Agustina berprofesi sebagai petani jadi mata pencaharian mereka adalah bertani. Terpaksa Agustina menggadaikan laptopnya untuk sementara waktu sampai orang tua dikampung mengirimkannya uang. Itupun uang yang kirimkan hasil dari meminjam ke tetangga atau dari sanak saudara orang tuanya.<sup>70</sup>

## 3. Membayar Uang Kos-kosan

Salah satu yang menjadi alasan penggadaian selain alasan kebutuhan pokok dan membayar uang SPP, penggadaian menggadaikan handphonenya karena membutuhkan uang untuk membayar kos-kosan. Seperti yang dilakukan saudara Dedi telah

<sup>68</sup>Ulil Sahrir (Penggadaian), Wawancara, (20 November 2019).

<sup>69</sup>Ramlin (Penggadaian), Wawancara, (22 November 2019).

<sup>70</sup>Agustina (Penggadaian), Wawancara, (17 November 2019).

menggadaikan handphone Vivo Y91 miliknya sebesar Rp.500.000.yang digunakan untuk membayar uang kos-kosan.

Seperti keterangan saudara Dedi, menjelaskan bahwa alasannya menggadaikan handphonenya adalah untuk membayar uang kos. Karena orang tuanya telat mengirimkan uang kos, jadi dia menggadaikan handphonenya untuk membayar kos Rp.500.000/bulan.<sup>71</sup>

#### ***D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Biaya Jasa Gadai pada Counter RDS Cell Kota Makassar***

Dalam pelaksanaan akad gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar, menurut penulissudah sesuai akad *rahn* di mana pihak counter RDS Cell bertindak sebagai *murtahin* dan penggadai sendiri bertindak sebagai *rahin*. Dalam pelaksanaan gadai tersebut, *rahin* mengajukan gadai kepada *murtahin* yang tentunya menyerahkan *marhun* yang akan dijadikan jaminan. Praktek yang terjadi pada counter RDS Cell, *marhun* akan ditahan oleh *murtahin* sebagai jaminan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutang yang ditanggungnya. Dalam menahan *marhun* terdapat biaya yang dikenakan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Biaya tersebut merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) yang meliputi biaya merawat dan sewa tempat gadai tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *murtahin* (penerima barang)

---

<sup>71</sup>Dedi (Penggadai), Wawancara, (25 November 2019).

mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Adapun ketentuan *rahn* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekuarangan menjadi kewajiban *rahin*.<sup>72</sup>

Penjelasan dalam Fatwa DSN MUI tersebut, point yang ke-3 berisi bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap kewajiban *rahin*. Dalam fatwa juga disebutkan bahwa dalam point ke-4 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan Fatwa tersebut jelas bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Para ulama maupun Fatwa DSN MUI tidak menjelaskan berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung *rahin*. Penulis berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) tersebut tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman tetapi biaya tersebut ditentukan berdasarkan jenis barang yang digadai dan besar kecilnya resiko dalam memelihara dan menyimpan barang gadai (*marhun*).

Menurut hasil penelusuran penulis dalam pelaksanaan transaksi gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar sudah sesuai prinsip *rahnakan* tetapi dalam penentuan biaya jasa gadai yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI pada point ke-4, karena counter RDS Cell Kota Makassar menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan

---

<sup>72</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. h, 365-366.

besarnya jumlah pinjaman yang di ajukan penggadai sedangkan dalam Fatwa DSN MUI point ke-4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis transaksi gadai barang elektronik dalam tinjauan ekonomi Islam pada counter RDS Cell Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar telah sesuai dengan prinsip gadai (*rahn*). Akan tetapi dalam penentuan biaya jasa gadai (biaya pemeliharaan dan penyimpanan) dan penjualan barang belum sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan pada penjualan barang, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai barang elektronik pada Counter RDS Cell Kota Makassar antara lain, yaitu:
  1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
  2. Membayar Uang SPP
  3. Membayar Uang Kos
3. Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan gadai pada counter RDS Cell Kota Makassar sudah sesuai prinsip *rahn* karena untuk memelihara barang gadai (*marhun*) sendiri akan ditanggung oleh *murtahin* juga *rahin* tetapi yang berkewajiban menanggung biayanya tetap menjadi kewajiban



*rahn*. Adapun besar biaya yang dikenakan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) belum sesuai karena pada counter RDS Cell Kota Makassar untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diajukan penggadai yaitu Rp.500.000.- dikenakan biaya sebesar Rp.50.000.-. Hal tersebut belum sesuai prinsip *rahn* karena dalam menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai seharusnya tidak didasarkan dari jumlah pinjaman tetapi seharusnya untuk pengenaan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut ditentukan dari besar kecilnya resiko yang ditanggung dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan gadai. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* juga menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

### **B. Implikasi**

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran unuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Untuk pembaca, supaya dapat meningkatkan pengetahuan tentang tinjauan ekonomi Islam khususnya tentang transaksi gadai barang elektronik.
2. Untuk pihak counter RDS Cell seharusnya dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan gadai tidak menyimpang dari prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI yaitu tidak boleh dotentukan berdasarkan jumlah pinjaman,

tetapi berdasarkan besar kecilnya resiko dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut.

3. Untuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seharusnya mengeluarkan fatwa baru mengenai besar biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'anul Karim**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah "Wacana Ulama Dan Cendekiawan"*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Ahmad, Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian syariah*, Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. I; Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikuto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Al-Ju'fiy, Imran Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 3: Dar Al-Fikr, 1983.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mua'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, yogyakarta: UII Press 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 Bandung: al-Ma'raf, 1983.
- Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- D. Soepeno, M. Nafali, *Analisis Pengaruh Faktor-faktor Perilaku Konsumen Terhadap Kepuasan Pembeli Makanan Mie Instan Merek Indomie*. Jurnal Emba Vol. 4, No. 4 Desember 2016.
- Huda, Nurul & Heykal M. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Cet ke-3; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Ghofur, Abdul. dkk. *Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.

- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Irfan, Andi. *Suatu Tinjauan Islam Praktik “Boroh” (Pegadaian) Mengatasi Masalah Dengan Masalah*. Vol. 10, No. 2, 2012.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Ed. 3; Jakarta: Erlangga, 2009.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998.
- Misno, Abdurrahman. *Gadai Dalam Syari’at Islam*. Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 01 2017.
- Muslich, Maswnur. *Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Itu Mudah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nizar, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. I; Malang: Kurnia Advertissing, 2012.
- Nafali, M. Soepono, D. *Analisi Pengaruh Faktor-faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Merek Indomie*. Vol. 4, No. 4 Desember 2016.
- Nasution, Rachmad Saleh. *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*. Vol. 2, No. 2, 2016.
- Pari, Purwadi. Kashadi. *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip), 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rachmat, Syaifei. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Remy, Sjhadeini Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet ke-2. Jakarta: Kencana, 2015.

- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Aura Anugerah Utama Raharja, 2012.
- Sulisteni, Elise T. dan Erwin, Rudi T. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah, alih bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, Bandung: PT Al-Maarif, 1996.
- Sriwahyuni, Eka. *Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf*. AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Susanti. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syari'ah Cabang Simpang Patal Palembang*. Intelektualita Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Surepno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September 2018.
- Sofi'i, Imam. *Analisisn Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al-Muqrin Pondok Cabe Palembang)*. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Mehami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tim Visi Yustisia. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Turmudi, Muhammad. *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Al-'Adl, Vol.9 No. 1, Januari 2016.
- Volmar, H.F.A.V. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 2002.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

## Nota Gadai Barang

**RDS CELL & COM**  
Gadai / Beli / Service Handphone & Computer  
Jl. Talasapang No. 3 (Depan SPBU)  
HP/WA. 085.299.845.445 - 0823.4726.1616 - 085.825.667.427, Fax. 823.1426  
BCA: 7685089947 - MANDIRI: 162.00.1175434.01 - BNI: 0350093794 - BRI: 3053.01.058875.53.2  
a.n. (H. MUH. RADHI RASDHA, SE) | (KHAERIAH KASIM) | (H. MUH. RADHI RASDHA)

No. Nota: 2507

**NOTA GADAI BARANG**

1. Telah terima uang gadai dari "RDS Cell" Rp. 250.000  
dari nilai gadai Merk: 2507 Tipe: 2507  
Seri: 2507 dengan biaya jasa gadai (10% per Bulan)  
Jika pihak pegadai menebus jangka 3 hari maka biaya jasa gadai (5%)

2. Barang Gadai ini milik KHAERIAH KASIM  
dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. RDS Cell tidak bertanggung jawab adanya kerusakan Barang Gadai selama masa gadai, kecuali layar retak karena penyimpanan dan jika Bertanya via Hp, WA, SMS wajib sebutkan Nama, No. Nota, Jenis Barang Gadai

4. Masa Gadai 1 Bulan, Jika belum ditebus, maka otomatis masuk Masa Perpanjangan 1 Bulan. Jika belum ditebus, maka otomatis masuk Masa Lelang 1 Minggu. Jika belum ditebus, Maka RDS Cell berhak menjual barang gadai & Datanya "tanpa persetujuan & tanpa dihubungi" Pihak Pegadai, dan Pihak Pegadai tidak berhak menuntut RDS Cell baik pidana/perdata.

5. Gadai barang dimulai tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 20/01/2020

6. Kelengkapan: Dos ☐ Baterai ☐ Cas ☐ H. Free ☐  
1 2 3  
Tas ☐ Memori ☐ Soft Case ☐ Hard Case ☐  
Mouse ☐ E-KTP ☐ Sim Card ☐ Modem ☐

No. HP. Pegadai: 081 823 113 128

Catatan:  
① ≤ 1 Bulan 3 Hari = 1 1/2 bulan, ≤ 1 Bulan 10 Hari = 2 bulan.  
② (Masa gadai 1 Bulan) (Masa Perpanjangan 1 Bulan) (Masa Lelang 1 Minggu) Lewat HANGUS  
3. Nota rangkap 2 lbr (RDS Putih & Pegadai Hijau).  
4. Biaya Adm. berdasarkan nominal gadai barang.  
5. ....  
6. ....

7. KTP Asal: Makassar, 20/12/2019  
RDS Cell & Com, KHAERIAH KASIM Pegadai,

H. MUH. RADHI RASDHA / KHAERIAH KASIM NAMA: MUH. SCHIR

1. DITEBUS PALING LAMBAT 2 BULAN 1 MINGGU, LEWAT HANGUS
2. DILARANG "KERAS" MENELEPON, MENEBUS SAAT JAM TUTUP TOKO
3. BUKA JAM 09.00 - 20.00 WITA, HARI JUM'AT TUTUP JAM 12.00 - 15.00 WITA  
HARI LIBUR TETAP BUKA KECUALI HARI MINGGU TUTUP
4. HARAP BARANG GADAI DI CAS FULL SEBELUM DIGADAI

ANDA SOPAN, KAMI SEGAH





